KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-18
	TGL. PEMBUATAN	: 21 April 2026
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 21 April 2026
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, S.H., M.H. NIP. 19701016 199203 1 001
	NAMA SOP	**Penyusunan Rencana Strategis**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Berjalan; 3. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun Berjalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 5. Peraturan Menteri Hukum tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun Berjalan; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 7. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Berjalan.	1. Memiliki pemahaman terkait perumusan kebijakan; 2. Memiliki pemahaman terkait perencanaan dan kebijakan publik; 3. Memiliki kemampuan statistik, pengolahan data dan informasi; 4. Memiliki pemahaman terkait administrasi negara.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka penyusunan Renstra dapat terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Program dan Pelaporan	Eselon II	Sekretaris Jenderal KI	Direktur Jenderal KI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan perumusan arah kebijakan DJKI turunan dari Rencana Strategi Kementerian Hukum melalui rapat koordinasi					1. RPJMN 2. Renstra DJKI Periode Sebelumnya 3. Renstra Kementerian Hukum 4. Nota Dinas	14 hari kerja	1. Perumusan arah kebijakan DJKI 2. ORTA 3. IKU 4. SKP 5. Notulensi Rapat	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran
2	Melakukan kajian atas capaian Rencana Strategis DJKI yang sudah berjalan (5 tahun sebelumnya)					1. Perumusan arah kebijakan DJKI 2. ORTA 3. IKU 4. SKP 5. Notulensi Rapat 6. Evaluasi Renstra DJKI 7. Hasil evaluasi Perjanjian Kinerja dan Tarja	3 hari kerja	Hasil kajian awal atas capaian Renstra DJKI	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran
3	Mengumpulkan data inventarisasi belanja masalah dengan stakeholder					Hasil kajian awal atas capaian Renstra DJKI	20 hari kerja	Matriks belanja masalah	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Evaluasi,Pelaporan dan Pengendalian Internal
4	Melakukan analisa terkait Visi, Misi,Tujuan, Isu Strategis, Output, Outcome, Indikator, dan Target					1. Matriks belanja masalah 2. RPJMN 3. Renstra DJKI Periode Sebelumnya 4. Renstra Kementerian Hukum	7 hari kerja	Usulan Konsep Rencana Strategis	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran
5	Melakukan telaah atas hasil konsep Rencana Strategis DJKI melalui Focus Discussion Group					Usulan Konsep Rencana Strategis	3 hari kerja	Konsep Rencana Strategis ditelaah	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran
6	Melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis DJKI					Konsep Rencana Strategis ditelaah	5 hari kerja	Konsep Rencana Strategis	Kegiatan dikoordinasi oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran
7	Memberikan paraf persetujuan terkait konsep Rencana Strategis DJKI			Tidak	Tidak	Konsep Rencana Strategis	1 hari kerja	Konsep Rencana Strategis diparaf	
8	Memberikan persetujuan atas konsep Rencana Strategis DJKI			Paraf	Setuju	Konsep Rencana Strategis diparaf	1 hari kerja	Konsep Rencana Strategis disetujui	
9	Menerbitkan Surat Keputusan Rencana Strategis DJKI					Konsep Rencana Strategis disetujui	3 hari kerja	Rencana Strategis	
						Estimasi Total Waktu	**57 hari kerja**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi